



Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

Jalan HR. Subrantas KM.9 Pekanbaru
Telp/Fax. 0761-66455



**LAPORAN
PELAKSANAAN
KEGIATAN**

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR



Dengan berakhirnya tahun 2021 maka berakhir pula seluruh rangkaian kegiatan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi peradilan ditahun 2021. Dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance), Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 ini disusun sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban dan sekaligus sebagai salah satu alat evaluasi dan refleksi dalam penyempurnaan rencana capaian kinerja pada tahun yang akan datang.

Secara keseluruhan, Laporan Kegiatan Tahun 2021 ini berisi pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang selaras dengan target kinerja yang telah ditetapkan dan diharapkan berujung pada peningkatan pelayanan publik dan membangun kepercayaan publik terhadap lembaga dan aparatur pengadilan TUN di Propinsi Riau.

Akhir kata, saya selaku pimpinan mengucapkan terimakasih atas segala dedikasi dan partisipasi aktif, baik pikiran, tenaga, dan materi segenap Hakim dan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang telah mampu memberikan yang terbaik bagi pencari keadilan.

Kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi peningkatan kualitas dan kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru ditahun berikutnya.

Pekanbaru, 3 Januari 2022

Wakil Ketua Pengadilan
Tata Usaha Negara Pekanbaru,

DARMAWI, S.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II KEADAAN & PENYELESAIAN PERKARA	
A KEADAAN PERKARA	4
1. KEADAANPERKARATINGKATPERTAMA	4
2. KEADAAN PERKARA TINGKAT BANDING	4
3. KEADAAN PERKARA TINGKAT KASASI.....	5
4. KEADAAN PERKARA TINGKAT PENINJAUAN KEMBALI	5
B PENYELESAIAN PERKARA	6
1. JUMLAH SISA PERKARA YANG PUTUS	6
2. JUMLAH PERKARA YANG PUTUS TEPAT WAKTU	6
3. JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING, KASASI DAN PK	7
C AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKASI ISO DIPENGADILAN.....	8
1. POSBAKUM(SATKERYANGMENDAPATALOKASIDANREALISASIANGGARAN)	8
2. PERKARA PRODEO (PEMBEBASAN BIAYA PERKARA).....	8
BAB III SUMBER DAYA MANUSIA	9
A. SUMBERDAYAMANUSIA(SDM) BERDASARKANKEPANGKATAN/GOLONGAN/PENDIDIKAN	9
B. PROMOSI & MUTASI.....	12
C. Pensiun	12
D DIKLAT (SDM TEKNIKS/NON TEKNIS YANG TELAH MENGIKUTI DIKLAT)	13
BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI ...	15
A. PENGELOLAANKEUANGAN.....	15
B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA	15
C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI	19
IMPLEMENTASI ECOURT DILINGKUNGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU	19
IMPLEMENTASI SIPP DILINGKUNGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU	20
BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	21
A. AKREDITASIPENJAMINANMUTU	21
B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)	22
C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK	22
BAB VI PENGAWASAN	26
A. PENGAWASAN BIDANG	26
B. EVALUASI	26
BAB VII PENUTUP.....	31
A. KESIMPULAN.....	32
B. REKOMENDASI.....	32

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Keadaan Perkara Pengadialan Tata Usaha Negara Pekanbaru	4
Tabel 2. Keadaan Perkara Tingkat Banding	4
Tabel 3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi.....	5
Tabel 4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali	5
Tabel 5. Jumlah sisa perkara tingkat banding yang diputus tahun 2021	6
Tabel 6. Jumlah Perkara Tingkat Pertama yang diputus tepat waktu	6
Tabel 7. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, dan PK	7
Tabel 8. Posbakum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru	8
Tabel 9. Perkara Prodeo Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.....	8
Tabel 10. Sumber Daya Manusia Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.....	9
Tabel 11. SDM berdasarkan kelompok Golongan	11
Tabel 12. SDM berdasarkan kelompok Pendidikan	11
Tabel 13. Penghargaan Satya Lencana	11
Tabel 14. Mutasi masuk PengadilanTata Usaha Negara Pekanbaru.....	12
Tabel 15. Mutasi Keluar dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru	12
Tabel 16. Pensiun di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru	12
Tabel 17. Jumlah mengikuti diklat teknis dan non teknis	13
Tabel 18. Realisasi Anggaran DIPA 01	15
Tabel 19. Realisasi Anggaran DIPA 05	15
Tabel 20. Realisasi PNPB Tahun 2021	16
Tabel 21. Daftar Tanah	18
Tabel 22. Daftar PSP Tanah & Gedung	18
Tabel 23. Daftar PSP Kendaraan dinas.....	18
Tabel 24. Daftar PSP Mesin Non TIK	19
Tabel 25. Daftar PSP Mesin TIK	19
Tabel 26. Implementasi E-Court Tahun 2021	19
Tabel 27. Implementasi SIPP	20
Tabel 28. Akreditasi Penjamin Mutu Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.....	21
Tabel 29. Inovasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru	23
Tabel 30. Pengawasan bidang Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.....	28
Tabel 31. IKM & IPK Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.....	31

BAB I

PENDAHULUAN



A.KEBIJAKAN UMUM

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru merupakan pengawasan dan kontrol terhadap keputusan dan kebijakan pimpinan daerah 12 (dua belas) kabupaten kota sebagai wilayah hukum, yang meliputi :

1. Kota Pekanbaru
2. Kota Dumai
3. Kabupaten Kampar
4. Kabupaten Pelalawan
5. Kabupaten Siak
6. Kabupaten Bengkalis
7. Kabupaten Rohul
8. Kabupaten Rokan Hilir
9. Kabupaten Indragiri Hulu
10. Kabupaten Indragiri Hilir
11. Kabupaten Kuantan Sengingi
12. Kabupaten Kepulauan Meranti

Pada tahun 2021, di masa pandemi covid 19 Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tetap berupaya melaksanakan tupoksinya dengan baik dan mengikiti regulasi Mahkamah Agung terkait penanganan Covid-19 antara lain :

1. SEMA No. 1 Tahun 2020 sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan SEMA No. 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas selama masa pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

2. SEMA No. 6 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Militer dan TUN untuk mewujudkan performa atau kinerja Peradilan Indonesia yang unggul/prima (*Indonesia Court Performance Excellence*). Tahun 2021, Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan seluruh satker di wilayah hukumnya telah diakreditasi dan memperoleh nilai akreditasi A Excellent dengan nilai 90,68.
3. SEMA No. 8 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan SEMA No. 9 Tahun 2020 tentang Pengaturan Jam kerja dalam Tatahan Normal Baru pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya untuk wilayah Jabodetabek dan wilayah dengan status Zona Merah Covid-19

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tetap berupaya meningkatkan kinerja untuk memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat pencari keadilan, dalam bentuk :

1. PTUN Pekanbaru mendapatkan predikat kedua terbaik dalam pelaporan Pengadilan dengan nilai 428;
2. Pengadilan terbaik dalam pelaksanaan peradilan elektronik kategori kelas / tipe B dengan nilai 84,45;
3. Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yang sesuai protokol kesehatan;
4. Penerapan aplikasi *E-Court* dengan fitur *e-filing* (pendaftaran perkara secara elektronik), *e-payment* (pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik), *e-summons* (pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak secara elektronik). Melalui aplikasi *E-Court* pendaftar gugatan/permohonan dari seorang advokat saja tanpa harus datang ke pengadilan.
5. Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu, sebagaimana program Dirjen Badan
6. Sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, pada tahun 2021 Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah mengikuti penilaian Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi, walaupun belum berhasil memperoleh predikat WBK.

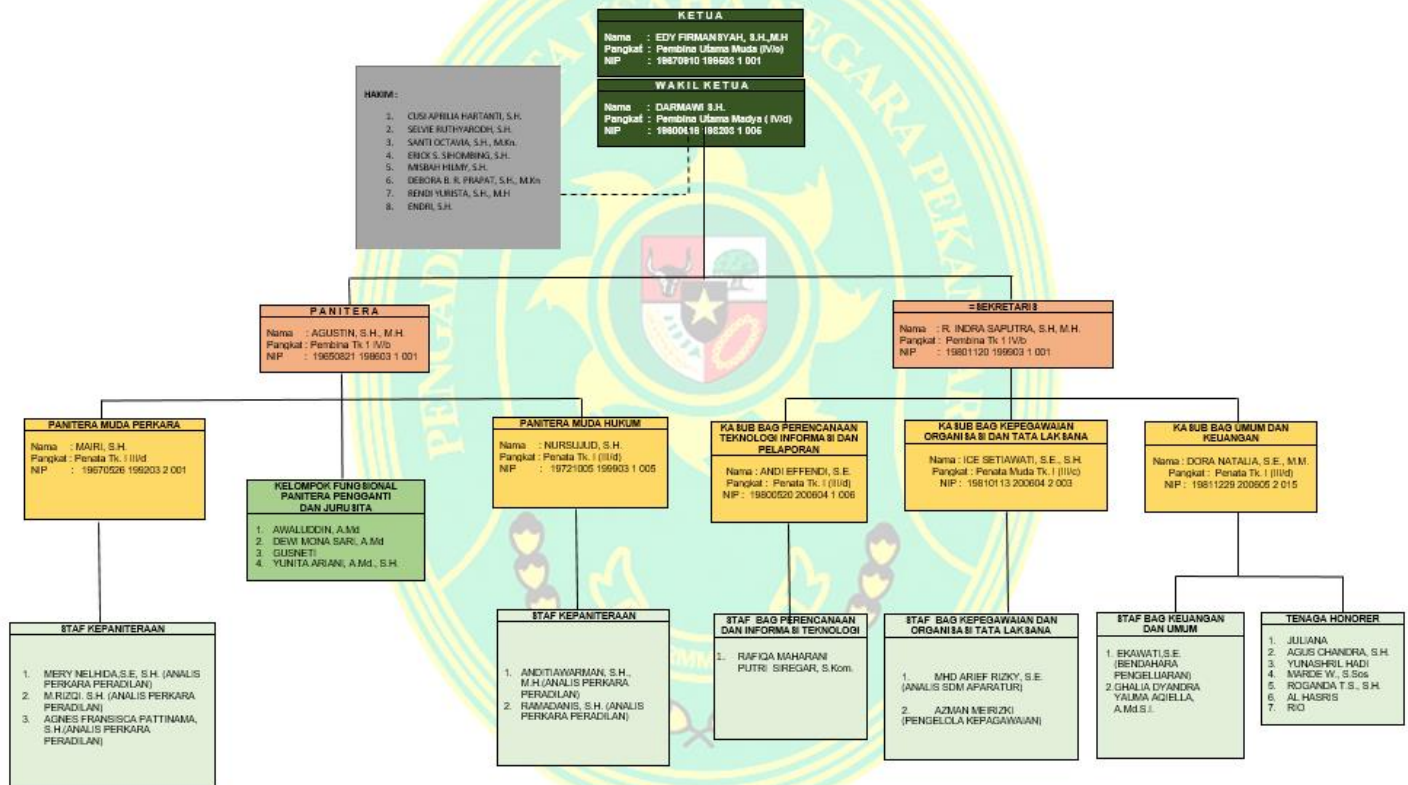
B. VISI & MISI

Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru : "MEWUJUDKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU YANG AGUNG." dalam Tatahan Normal Baru.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan.

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TUN PEKANBARU TAHUN 2021 SESUAI PERMA NOMOR 7 TAHUN 2015



BAB II

KEADAAN PERKARA, PENYELESAIAN PERKARA, DAN AKREDITASI



A. KEADAAN PERKARA

1. KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

Berikut ini rincian keadaan perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tahun 2021.

Tabel 1. Keadaan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Tahun 2021

Jenis Perkara	Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sep	Okto	Nov	Des
GUGATAN												
a. Sisa Tahun 2020												13
b. Masuk	8	5	11	5	1	6	7	3	3	5	3	10
c. Cabut	3	1	1	2	-	-	1	2	1	2	1	1
d. Putus	2	2	-	5	6	4	7	6	6	2	3	4
e. Sisa Tahun 2021	16	18	28	26	21	23	22	17	13	14	13	18
PERMOHINAN												
a. Sisa Tahun 2020												-
b. Masuk	2	1	-	-	-	1	-	-	2	2	-	2
c. Cabut	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
d. Putus	1	1	1	-	-	-	1	-	-	1	2	-
e. Sisa Tahun 2021	1	1	-	-	-	1	-	-	1	2	-	2

2. KEADAAN PERKARA TINGKAT BANDING

Berikut ini rincian keadaan perkara tingkat banding pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tahun 2021.

Tabel 2. Keadaan Perkara Tingkat Banding

Jenis Perkara	Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sep	Okto	Nov	Des
GUGATAN												
a. Sisa Tahun 2020												14
b. Masuk	-	4	-	4	1	3	3	7	2	2	1	2
c. Cabut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d. Putus	2	3	3	2	3	2	3	1	1	5	5	4
e. Sisa Tahun 2021	12	13	10	12	10	11	11	17	18	15	11	9

3. KEADAAN PERKARA TINGKAT KASASI

Berikut ini rincian keadaan perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang mengajukan kasasi tahun 2021.

Tabel 3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

Jenis Perkara	Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sep	Okto	Nov	Des
GUGATAN												
a. Sisa Tahun 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
b. Masuk	4	1	1	2	3	-	2	1	-	1	2	3
c. Cabut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
d. Putus	2	1	6	3	1	-	1	-	3	-	3	-
e. Sisa Tahun 2021	17	17	12	11	13	13	14	15	12	13	12	14

4. KEADAAN PERKARA TINGKAT PENINJAUAN KEMBALI

Berikut ini rincian keadaan perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang mengajukan Peninjauan Kembali tahun 2021

Tabel 4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

Jenis Perkara	Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sep	Okto	Nov	Des
GUGATAN												
a. Sisa Tahun 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
b. Masuk	-	2	-	-	-	2	-	-	1	1	2	1
c. Cabut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d. Putus	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
e. Sisa Tahun 2021	4	5	5	5	5	7	7	7	8	9	9	10
PERMOHANAN												
a. Sisa Tahun 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b. Masuk	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
c. Cabut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d. Putus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
e. Sisa Tahun 2021	-	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1

B. PENYELESAIAN PERKARA

1. JUMLAH SISA PERKARA YANG DIPUTUS

Berikut ini rincian jumlah sisa perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tahun 2021 yang diputus tahun 2021

Tabel 5. Jumlah sisa perkara tingkat banding yang diputus tahun 2021

Jenis Perkara	Sisa Perkara tahun 2020	Sisa Perkara tahun 2020 yang diputus tahun 2021	Persentase Penyelesaian Sisa Perkara
GUGATAN	13	13	100 %
PERMOHONAN	0	0	0%

2. JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU

Sesuai surat edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014, batas penyelesaian perkara yaitu maksimal 3 bulan untuk penyelesaian perkara di pengadilan tingkat banding dan maksimal 5 bulan untuk penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama Berikut ini rincian jumlah perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang diputus tepat waktu pada tahun 2021.

Tabel 6. Jumlah Perkara Tingkat Pertama yang diputus tepat waktu

Jenis Perkara	Jumlah Perkara Putus Tahun 2021	Jumlah Perkara Putus Tepat Waktu	Jumlah Perkara Putus Tidak Tepat Waktu	Persentase Perkara Putus Tepat Waktu
GUGATAN	62	55	7	88,71%
PERMOHONAN	8	8	0	100%

3. JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING, KASASI, DAN PK

Berikut ini rincian jumlah perkara di tahun 2021 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.

Tabel 7. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, dan PK

No	PERKARA	Jumlah Perkara Putus Tahun 2021	Perkara Yang Putus Th. 2021 Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding		Perkara Yang Putus Th. 2020 Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi		Perkara Yang Putus Th. 2020 Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK	
			Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)
1	GUGATAN	59	29	49	27	54	44	88
2	PERMOHONAN	8	-	-	-	-	8	100

C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

1. POSBAKUM

Posbakum (Pos Bantuan Hukum) adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi dan advice hukum serta

pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara. Berikut data alokasi dan realisasi anggaran Posbakum pada satker Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tahun 2021.

Tabel 8. Posbakum di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

No	Satuan Kerja	Jumlah Anggaran Posbakum (Rp.)	Realisasi Anggaran Posbakum		Jumlah Masyarakat Yang Mendapatkan Layanan Posbakum (orang)
			(Rp.)	(%)	
1	Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru	Rp.38.500.000	Rp 34.206.000	88 %	41

2. PERKARA PRODEO

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, fasilitas Pembebasan Biaya Perkara adalah sebuah layanan dimana negara menanggung biaya proses berperkara di pengadilan. Berikut data

Prodeo pada pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Tahun 2021 adalah sebagai berikut

Tabel 9. Perkara prodeo di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

No.	Satuan Kerja	Jumlah Perkara Prodeo Diselesaikan Th. 2021	Jumlah Anggaran Prodeo (Rp.)	Realisasi Anggaran Prodeo	
				(Rp.)	(%)
1	PTUN PKU	0	Rp. 750.000	0	0

BAB III

SUMBER DAYA



A. KOMPOSISI SUMBER DAYA

Sumber daya manusia pada beberapa pengadilan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tahun 2021 ada penambahan CPNS dan Pengurangan pegawai akibat promosi jabatan keluar dan meninggal dunia. Namun masih ada mengalami kekosongan pada

Satu formasi jabatan dan kekurangan sumber daya manusia khususnya tenaga staf pengadministrasi umum. Berikut ini rincian sumber daya manusia yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru 2021.

1. SUMBER DAYA MANUSIA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

Jumlah Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Tahun 2021 sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang terdiri dari 9 (sembilan) orang Hakim dan 19 (sembilan belas) Pegawai dan

7 (tujuh) orang tenaga honorer. Rincian sumber daya manusia pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel 10. Sumber Daya Manusia Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Sri Setyowati, S.H., M.H	Ketua	Pensiun
2.	Darmawi. S.H., M.H.	Wakil Ketua	
3.	Cusi Aprilia Hartanti, S.H.	Hakim	
4.	Selvie Ruthyarodh, S.H.	Hakim	
5.	Erick S. Sihombing, S.H.	Hakim	
6.	Santi Octavia, S.H., M.Kn.	Hakim	

7.	Debora DR. Parapat, S.H.	Hakim	
8.	Misbah Hilmy, S.H.	Hakim	
9.	Rendi Yurista, Ss.H., M.H.	Hakim	
10.	Endri, S.H.	Hakim	
11.	Agustin, S.H., M.H.	Panitera	
12.	R. Indra Saputra, S.H., M.H.	Sekretaris	
13.	Nur Sujud, S.H.	Panmud Perkara	
14.	Mairi, S.H.	Panmud Hukum	
15.	Dora Natalia S, S.E., M.M.	Kasubag Umum dan keuangan	
16.	Ice Setiawati, S.E., S.H.	Kasubag Kepegawaian dan Ortala	
17.	Awaluddin, A.Md.	Panitera Pengganti	
18.	Dewi Mona Sari, A.Md.		
19.	Yunita Ariani, A.Md., S.H., M.H.		
20.	Gusneti	Juru Sita Pengganti	
21.	Azman Meirizki		
21.	Anditiawarman B, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	
22.	Ekawati, S.E.		
23.	Mery Nelhida, S.E., S.H.	Panitera Pengganti	Meninggal dunia
24.	Agnes F. Patinama, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	
25.	Mohd. Arief Rizky, S.E.	Analisis SDM Apaatur	
26.	M. Rizqi, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	
27.	Ramadanis, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	
28.	Raiqa Maharani Siregar, S.Kom	CPNS	
30.	Ghalia Dyandra Putri Aqiella, S.SIP	CPNS	
31.	Juliana	PPNPN	
32.	Agus Chandra, S.H.	PPNPN	
33.	Yunashril Hadi, A.Md.	PPNPN	
34.	Marde Wiyelde, S.Sos	PPNPN	
35.	Roganda Tua Sihombing, S.H.	PPNPN	
36.	Al Haris	PPNPN	
37.	Rico Suzandi Putra	PPNPN	

2. SUMBER DAYA MANUSIA BERDASARKAN KELOMPOK GOLONGAN

Jumlah Hakim dan Pegawai Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Tahun 2021 sebanyak

28 Orang, Berikut rincian Jumlah hakim dan pegawai berdasarkan kelompok Golongan.

Tabel 11. SDM berdasarkan kelompok Golongan

NO	Golongan IV (orang)	Golongan III (orang)	Golongan II (Orang)	Golongan I (Orang)
1	4	23	1	-

3. SUMBER DAYA MANUSIA BERDASARKAN KELOMPOK PENDIDIKAN

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tahun 2021 berdasarkan kelompok Pendidikan.

Tabel 12. SDM berdasarkan kelompok Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan (Orang)						
	S3	S2	S1	DIII	DII	DI	SMA
1	-	6	17	3	-	-	2

4. PENGHARGAAN SATYA LENCANA KARYA

Pada tahun 2021, Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak menerima Penghargaan Satya Lencana Karya dari Mahkamah Agung.

Tabel 13. Penghargaan Satya Lencana

NO	PENGHARGAAN				
	SATYA LENCANA KARYA SATYA XXX (ORANG)	SATYA LENCANA KARYA SATYA XX (ORANG)	SATYA LENCANA KARYA SATYA X (ORANG)	KARYA SATYA SEWINDU (ORANG)	KARYA SATYA DWIWINDU (ORANG)
1	-	-	NIHIL		-

B. PROMOSI & MUTASI

Berikut rincian promosi dan mutasi Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

Tabel 14. Mutasi masuk Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

NO	Nama	Jabatan	Keterangan (Mutasi dari)
1	DARMAWI, S.H.	WAKIL KETUA	PTUN MATARAM
2	RENDI YURISTA, S.H.M.H	HAKIM	PTUN PADANG
3	RAFIQA MAHARANI PUTRI SIREGAR, S.KOM	PRANATA KOMPUTER	PEGAWAI BARU
4	GHALIA DYANDRA YAUMA AQIELLA, A.MD. S.I.	ARSIPARIS	PEGAWAI BARU

Tabel 15.. Mutasi Keluar dari PT Pekanbaru

NO	Nama	Jabatan	Keterangan (Mutasi keluar ke)
1	Andi Effendi, S.E	Kasubag PTIP	PTUN Padang
2	Muhammad Afif, S.H.,M.H	Hakim	PTUN PALEMBANG

C. PENSIUN

Berikut rincian pensiun Hakim dan Pegawai pada Pengadilan sewilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

Tabel 16. Pensiun di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

Nama	Jabatan	Keterangan
1. SRI SETYOWATI, S,H,. M.H.	KETUA	PENSIUN
2. MERY NELHIDA, S.E.	PANITERA PENGGANTI	PENSIUN KARENA MENINGGAL DUNIA

D. DIKLAT

Kebijakan pengembangan kompetensi sumber daya manusia teknis peradilan dilakukan dengan mengacu kepada kerangka pelatihan dan pengembangan yang mencakup seluruh aspek dan metode untuk mewujudkan tenaga teknis dan non teknis peradilan yang profesional, berintegritas dan dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan. Pelatihan dan pengembangan kompetensi ini,

diarahkan untuk meningkatnya kualitas penyelenggaraan, peradilan dan pelayanan hukum kepada masyarakat yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan terhadap badan peradilan. Berikut rincian jumlah hakim dan pegawai yang mengikuti diklat teknis dan diklat menpin pada tahun 2021 di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

Tabel 17. Jumlah mengikuti diklat teknis dan non teknis

No	Nama	Hakim dan Pegawai Yang Mengikuti Diklat Teknis	Hakim dan Pegawai Yang Mengikuti Diklat Menpin
1	ERICK S. SIHOMBING, S.H.	- DIKLAT ONLINE EXECUTIVE SUMMARY - DIKLAT ONLINE ENGLISH EFFECTIVE WRITING BATCH 3 - DIKLAT TINGKAT LANJUT HAKIM LINGKUNGAN - SERTIFIKASI HAKIM MEDIATOR - DIKLAT HAKIM PERIZINAN PASCA UU CIPTA KERJA - DIKLAT TEKNIS YUDISIAL SENGKETA PENGUJIAN UNSUR PENYALAHGUNAAN WEWENANG	
2	CUSI APRILIA HARTANTI, S.H.	- SERTIFIKASI LINGKUNGAN - DIKLAT TEKNIS YUDISIAL SENGKETA PENGUJIAN UNSUR PENYALAHGUNAAN WEWENANG	
3	SANTI OCTAVIA, S.H., M.Kn.	- SERTIFIKASI LINGKUNGAN - BIMTEK PENDALAMAN SENGKETA PERTANAHAN - DIKLAT HAKIM PERIZINAN PASCA UU CIPTA KERJA	
4	MUHAMMAD AFIF, S.H., M.H.	- BIMTEK PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK - SERTIFIKASI HAKIM MEDIATOR	
5	MISBAH HILMY, S.H.	- DIKLAT TEKNIS YUDISIAL SENGKETA PERTANAHAN - BIMTEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA PENGADAAN BARANG DAN JASA	

		- SERTIFIKASI HAKIM LINGUNGAN HIDUP - BIMTEK UPAYA ADMINISTRASI DALAM PEMERIKSAAN SENGKETA TUN PASCA UU NO. 30 TAHUN 2014	
6	DEBORA DR. PARAPAT, S.H., M.Kn.	- DIKLAT TEKNIS YUDISIAL SENGKETA PERTANAHAN - SERTIFIKASI HAKIM LINGUNGAN HIDUP	
7	RENDI YURISTA, S.H., M.H.	- BIMTEK PENDALAMAN SENGKETA PERTANAHAN	
8	AGUSTIN, S.H., M.H.	- BIMTEK KEPANITERAAN TENTANG E-COURT - DIKLAT MANAJEMEN LAPOAN KINERJA - BIMTEK PELAYANAN DISABILITAS	
9	R. INDRA SAPUTRA, S.H., M.H.	- PELATIHAN ONLINE MANAJEMEN LAPORAN KINERJA - BIMTEK PENGADAAN BARANG DAN JASA - BIMTEK PELAYANAN DISABILITAS	
10	NUR SUJUD, S.H.	- BIMTEK KEPANITERAAN TENTANG E-COURT - DIKLAT TEKNIS YUDISIAL PANITERA	
11	ANDI EFFENDI, S.E	- BIMTEK KESEKRETARIATAN	
12	DORA NATALIA, S.E., M.M.	- E-LEARNING PENYEGARAN PPK - BIMTEK PENGADAAN BARANG DAN JASA - BIMTEK KESEKRETARIATAN	- DIKLA PKA
13	ICE SETIAWATI, S.E., S.H.	- BIMTEK KESEKRETARIATAN	- DIKLAT PKA - DIKLAT MANAJEMEN ASN
14	M. RIZQI, S.H.	- BIMTEK KEPANITERAAN TENTANG E-COURT - BIMTEK PELAYANAN DISABILITAS	
15	ANDITIAWARMAN, S.H.	- BIMTEK KESEKRETARIATAN	
16	GHALIA DYANDRA YAUMA AQIELLA, A.MD.S.I	- BIMTEK KESEKRETARIATAN - PELATIHAN ONLINE LITERASI DIGITAL	
17	MOHD ARIEF RIZKY, S.E.	- PELATIHAN PENYUSUNAN LKJIP	
18	DEWI MONA SARI, A.Md.	- BIMTEK PANITERA PENGGANTI	
19	RAFIQA MAHARANI PUTRI SIREGAR, S.KOM	- BIMTEK KESEKRETARIATAN	

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN SARANA DAN PRASARANA & TEKNOLOGI INFORMASI



A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Realisasi anggaran dan pengelolaan PNBP Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada Tahun 2021 dijelaskan pada tabel dibawah ini

1. REALISASI DIPA 01

Tabel 18. Realisasi Anggaran DIPA 01

No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
			RP	%	RP	%
1	Belanja Pegawai	4,685,722,000	4,449,249,457	94.95	236,472,543	5,05
	Belanja Barang	1,813,538,000	1,680,211,342	92.65	133,326,658	7,35
	Belanja Modal	349,000,000	348,418,500	99.83	581,500	0,17
	Total	6.848.260.000	6.477.879.299	-	370.380.701	-

2. REALISASI DIPA 05

Tabel 19. Realisasi Anggaran DIPA 05

No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
			RP	%	RP	%
1	Belanja Barang	38.500.000	34.206.000	88,85	4.294.000	11,15

3. REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

Berikut rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2021 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru:

Tabel 20. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2021

No	Bulan Laporan	Kode Akun							
		425131	425231	425232	425233	425239	425912	425911	425122
1	Januari	1.349.040	-	120.000	520.000	1.820.400	-	-	-
2	Februari	1.011.780	-	120.000	960.000	1.486.500	-	-	-
3	Maret	1.686.300	-	110.000	480.000	3.194.500	-	-	-
4	April	1.349.040	-	40.000	650.000	2.392.900	-	-	-
5	Mei	1.349.040	-	100.000	330.000	1.165.500	-	-	-
6	Juni	1.349.040	-	60.000	760.000	3.329.500	-	-	-
7	Juli	1.180.410	-	150.000	400.000	2.359.000	-	-	-
8	Agustus	1.180.410	-	40.000	600.000	2.145.400	-	-	-
9	September	1.180.410	-	120.000	550.000	2.834.300	-	-	-
10	Oktober	1.011.780	-	40.000	610.000	3.169.200	-	-	-
11	November	1.011.780	-	60.000	640.000	2.696.900	-	-	-
12	Desember	1.011.780	-	30.000	910.000	2.110.000	-	-	-
TOTAL		14.670.810	-	990.000	7.410.000	28.704.100	-	-	-

B. PENGELOLAAN SARANA & PRASARANA

Pengelolaan sarana dan prasarana Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tahun 2021 meliputi tanah dan bangunan,

Kendaraan Dinas, mesin non TIK, mesin non TIK , Mesin TIK dan Prasarana Lainnya.

1 TANAH

Dalam upaya terus mewujudkan tertib administrasi, tertib fisik dan tertib pengelolaan dan penatausahaan BMN. Pengadilan Tata Usaha Negara terus melakukan inventarisasi legalitas Kepemilikan seluruh BMN. Khususnya sertifikat tanah. Hal ini disebabkan kompleksitas masalah tanah yang menurut

ketentuan peraturan perundang – rundangan harus berstatus milik pemerintah Republik Indonesia. Berikut rincian progres pelaksanaan sertifikasi tanah selama tahun 2021 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

Tabel 21. Daftar Tanah

NO	Satuan Kerja	Sudah sertifikat	Belum Sertifikat	Total
1.	Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru	2 Bidang Luas 6 .699 M2	-	6 .699 M2

2. TANAH & GEDUNG

Penetapan Status Penggunaan BMN adalah suatu bentuk surat keputusan dari Pengelola Barang ataupun Pengguna Barang maupun Kuasa Pengguna Barang sesuai ketentuan pendelegasian maupun Kuasa Pengguna Barang sesuai ketentuan pendelegasian sebagian kewenangan untuk menetapkan kewenangan penggunaan BMN yang berada dan menjadi tanggung jawab Satuan Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN merupakan administrasi yang melekat pada materiil BMN itu sendiri sehingga harus dimiliki oleh setiap BMN yang sesuai ketentuan untuk menghindari duplikasi, kehilangan arsip data serta terjaminnya kepastian hukum BMN itu sendiri. Berikut rincian tanah dan gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang telah sudah/belum PSP tahun 2021.

Tabel 22. Daftar PSP Tanah & Gedung

No	Satuan Kerja	Nama Aset	Sudah PSP		Belum PSP	
			Luas	Nilai	Luas	Nilai
1	Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru	Tanah	6.699 m2	Rp.17.193798.000	-	-
		Bangunan	1.888 m2	Rp 6.347.827.000	-	-

3. KENDARAAN DINAS

Berikut rincian jumlah penetapan status penggunaan (PSP) kendaraan Dinas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Tahun 2021

Tabel 23. Daftar PSP Kendaraan dinas

No	Satuan Kerja	Jenis Kendaraan	Jumlah (Unit)	Jumlah Kendaraan dinas yang Sudah PSP	Jumlah Kendaraan dinas yang Belum PSP
1	Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru	Kendaraan Roda 4	4	4	-
		Kendaraan Roda 2	7	7	-

4. KENDARAAN DINAS

Berikut rincian jumlah penetapan status penggunaan (PSP) Mesin Non TIK pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Tahun 2021

Tabel 24. Daftar PSP Mesin Non TIK

No	Satuan Kerja	Jumlah Unit	Jumlah Sudah PSP	Jumlah Belum PSP
1	Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru	440	140	300

5. MESIN TIK

Berikut rincian jumlah penetapan status penggunaan (PSP) Mesin TIK pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Tahun 2021.

Tabel 25. Daftar PSP Mesin TIK

No	Satuan Kerja	Jumlah Unit	Jumlah Sudah PSP	Jumlah Belum PSP
	Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru	76	35	41

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

1. IMPLEMENTASI E-COURT

Ecourt adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik,

dan Persidangan yang dilakukan secara Elektronik. Pada tahun 2021, PTUN Pekanbaru telah menerapkan E-Court. Rincian jumlah perkara yang didaftarkan melalui ecourt, dijelaskan pada tabel di bawah ini

Tabel 26. Implementasi E-Court Tahun 2021

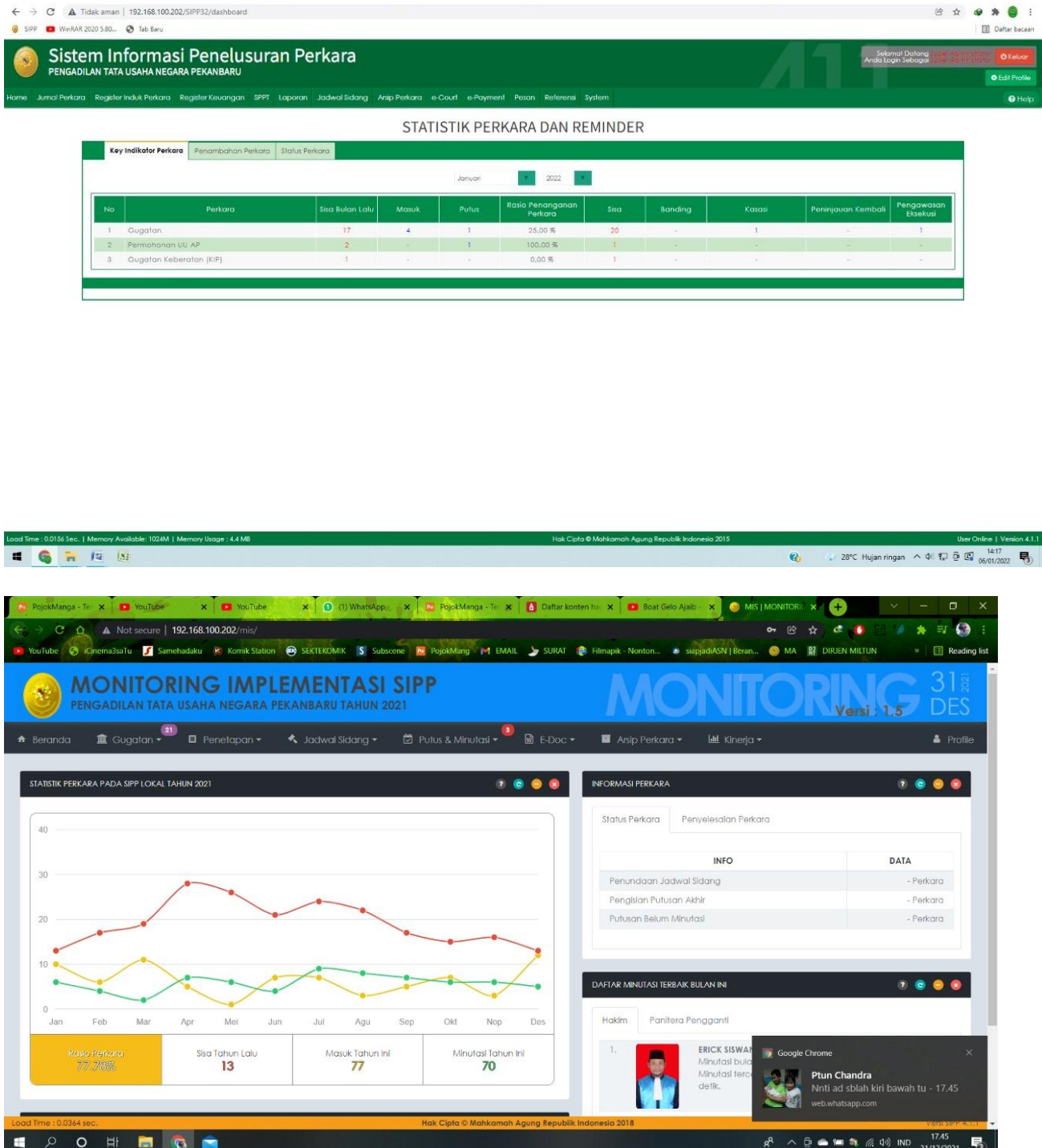
No	JENIS PERKARA	Pendaftaran (Dibayar)	Berhasil Nomor Perkara
1	GUGATAN	76	67
2	PERMOHONAN	13	10

2. IMPLEMENTASI SIPP

Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah mengimplementasikan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) versi 4.1.1

Penilaian implementasi SIPP pada PTUN Pekanbaru pada tahun 2021 dijelaskan pada tabel dibawah ini

Tabel 27. Implementasi SIPP Tahun 2021



BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN



A. AKREDITASI PENJAMINAN

Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik, Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru melakukan berbagai upaya demi mewujudkan visi “Badan Peradilan Yang Agung”. Salah satunya adalah mengikuti program Akreditasi Penjaminan Mutu Badan peradilan Militer dan TUN. Akreditasi Penjaminan Mutu yang dibentuk Ditjen Badimiltun ini dimaksudkan untuk menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat pada saat ini, selain itu juga untuk mewujudkan Performa/Kinerja Peradilan Indonesia yang Unggul (*Indonesian Court Performance Excellent/ICPE*).

Adapun kriteria penilaian yang digunakan meliputi tujuh area yaitu: 1) Kepemimpinan (*leadership*); 2) Perencanaan Strategis (*strategic planning*); 3) Fokus Pelanggan (*customer focus*); 4) Sistem Dokumentasi (*document system*); 5) Manajemen Sumber Daya (*resource management*); 6) Manajemen Proses (*process management*); dan 7) Hasil Kinerja (*performance results*). Semenjak tahun 2019 hingga saat ini Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah diakreditasi dan disurveillance dengan rincian sebagai berikut

Tabel 28. Akreditasi Penjamin Mutu Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

Satuan Kerja	Terakreditasi	Nilai	Tanggal APM/Surveillance	Keterangan
Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru	A (Excellent)	93,38	20 s.d. 22 Februari 2019	Akreditasi Penjaminan Mutu
Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru	A (Excellent)	90,68	7 s.d. 9 April 2021	Surveillance I

B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah menerapkan Pelayanan terpadu Satu Pintu sesuai SK Dirjen Badilmiltun

No.462/DJMT/KEP/8/2018

tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

PTSP PTUN Pekanbaru terdiri dari lima loket.

- 1) Loker 1 – Penerimaan Surat-surat;
 - 2) Loker 2 – Kasir;
 - 3) Loker 3 – Pendaftaran Perkara;
 - 4) Loker 4 – Produk Pengadilan;
 - 5) Loker 5 – Informasi dan Pengaduan.
- Selain itu, juga terdapat dua loket inzage, pojok e-Court, Mesin Antrian Sidang, dan kios-K yang dapat digunakan oleh

Pencari Keadilan di PTUN Pekanbaru.

Kios-K dapat digunakan pencari keadilan untuk mendaftarkan kehadiran ataupun untuk mendapatkan antrian PTSP melalui aplikasi SIANTAM. Selain itu, kios-K juga bisa digunakan untuk mengisi survey kepuasan masyarakat dan indeks persepsi secara online.

Pada tahun 2021, Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru mengikuti perlombaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dilaksanakan oleh Ditjen Badilmiltun, walaupun belum mendapatkan hasil yang diinginkan. Namun, dalam hal pelaporan PTUN Pekanbaru mendapat peringkat terbaik kedua.

C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Untuk mewujudkan Kinerja Peradilan yang Prima, Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru secara berkesinambungan terus melakukan pembenahan serta pembaharuan inovasi terhadap segala jenis layanan baik dari segi teknologi informasi dan sarana prasarana

yang nantinya akan menunjang kepuasan masyarakat dalam memperoleh layanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

Berikut inovasi pelayanan publik yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

Tabel 29. Inovasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

No	Nama Inovasi	Keterangan
1	SiAdil (Sistem Informasi dengan Asisten Digital)	Aplikasi chat (pesan) berbasis whatsapp yang membalas pesan secara otomatis dan bisa dihubungi oleh masyarakat 24x7 jam. Aplikasi ini mempermudah para pencari keadilan mengakses dan mengetahui proses jalannya perkara dan info seputar perkara seperti sisa panjar dan lainnya
2	e-MARISA (Sistem Antrian Sidang Elektronik)	e-MARISA bertujuan untuk menertibkan persidangan dengan melakukan antrian persidangan. Aplikasi ini dapat menarik data jadwal sidang dari Aplikasi SIPP yang selanjutnya diolah sehingga data jadwal sidang tersebut tidak hanya mempunyai jam persidangan tetapi juga akan memiliki nomor urut antrian sidang serta dapat mengetahui para pihak yang hadir dan tidak hadir dalam persidangan. Pihak yang menunggu giliran persidangan juga dapat melihat kesiapan panitera pengganti dan majelis hakim pada tampilan Display Antrian Sidang
3	SIANTAM (Sistem Layanan Tamu) berbasis Digital	Sistem Layanan Tamu Berbasis Digital merupakan aplikasi berbasis online yang digunakan sebagai salah satu cara untuk digitalisasi pelayanan khususnya dalam Pelayanan Tamu, yaitu: a. pengumpulan data pengunjung di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. file data pengunjung ini nantinya dijadikan sebagai data responden pelayanan publik di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. b. Digitalisasi Buku Tamu PTUN Pekanbaru c. Digitalisasi Antrian PTSP d. Digitalisasi Surat masuk ke PTUN Pekanbaru menggunakan surel (e-mail) resmi PTUN Pekanbaru e. Digitalisasi brosur PTUN Pekanbaru yang dapat diakses dengan melakukan pemindaian (scan) qr-code

4	PLISON (Pelayanan Informasi Online)	Aplikasi ini hadir dalam bentuk Asisten Digital chat whatsapp yang memberikan respon otomatis dan cepat kepada masyarakat yang membutuhkan informasi atau data tertentu mengenai kepaniteraan atau kesekretariatan tanpa harus mendatangi kantor PTUN Pekanbaru. PLISON dapat diakses pada hari Senin-Kamis pukul 08.00 – 15.00 dan hari Jumat pukul 08.00 – 12.00 dan 13.00 – 15.30 Masyarakat cukup menghubungi nomor WhatsApp PLISON atau klik tombol PLISON pada Website PTUN Pekanbaru dan mengikuti instruksi yang diberikan oleh Asisten Digital chat WhatsApp. PLISON, Solusi Pelayanan Informasi Pengadilan yang Terpadu, Mudah, Cepat, Tepat.
5	Podcast SANTUN (Semua tentang TUN)	Podcast adalah hasil rekaman audio yang dapat didengarkan oleh khalayak umum melalui media internet (<i>Channel</i> Youtube PTUN Pekanbaru). Podcast SANTUN ini digunakan sebagai sarana pendukung pelaksanaan zona integritas, serta sebagai <i>public campaign</i> dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
6	Ruang Tunggu Terbuka	Ruang Tunggu terbuka digunakan oleh pihak yang mengunjungi PTUN Pekanbaru saat menunggu giliran untuk mendapatkan layanan di PTUN Pekanbaru. Ruang tunggu ini disediakan agar terciptanya integritas dan ketertiban dalam proses pelayanan di PTUN Pekanbaru
7	Pojok e-Court	Pemanfaatan media informasi sebagai sarana sosialisasi tentang pelaksanaan e-Court berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi di pengadilan secara elektronik. Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru menyediakan 1 unit PC dan Printer yang dapat digunakan oleh pihak untuk mengakses e-Court.

8	<i>Command Center</i>	<i>Command Center</i> adalah sebuah wadah yang memfasilitasi monitoring, evaluasi dan koordinasi secara <i>remote distance</i> .
---	-----------------------	--

BAB VI

PENGAWASAN



A. PENGAWASAN BIDANG

Ketua PTUN Pekanbaru mengeluarkan Surat Keputusan Ketua ptun Pekanbaru Nomor W1.TUN6/49/OT.01.3/1/2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang Penunjukan Hakim Pengawas/Pembinaan Bidang-Bidang pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Adapun Tugas Hakim Pengawas Bidang adalah :

1. Bidang Teknis
 - a. Memantau pelaksanaan teknis administratif penyelesaian perkara, di PTUN Pekanbaru
 - b. Memantau & memeriksa pelaksanaan administrasi dan prosedur penerimaan perkara
 - c. Memantau dan memeriksa pelaksanaan penyelenggaraan administrasi register perkara
 - d. Memantau dan memeriksa pelaksanaan prosedur jalannya berkas perkara banding
 - e. Memantau dan memeriksa pelaksanaan penyelenggaraan administrasi laporan perkara
 - f. Memantau & memeriksa pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kearsipan perkara
 - g. Memberikan petunjuk dan bimbingan sesuai pola pembinaan dan pengendalian administrasi perkara

Menginventarisir temuan dan atau masalah baik teknis maupun administrasi peradilan serta menyampaikan laporannya kepada Ketua PTUN Pekanbaru dengan memberikan saran tindak lanjut maupun solusinya

1. Bidang Kesekretariatan
 - a. Memantau dan memonitoring pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
 - b. Melakukan pemantauan dan monitoring terhadap disiplin dan kinerja Hakim, Pejabat Kepaniteraan dan Pejabat lainnya.

Adapun hasil pengawasan bidang pada PTUN Pekanbaru tahun 2021 secara umum sebagai berikut :

1. Pola Bindalmin telah berjalan sesuai ketentuan dalam buku Pola Bindalmin, namun masih terdapat kurang ketelitian dalam melaksanakan tugas.
2. Penerapan hukum acara dalam putusan PTUN Pekanbaru secara substansi sudah baik.
3. Dalam bidang administrasi persidangan telah berjalan dan terlaksana dengan baik
4. Pelaksanaan teknis persidangan oleh Majelis Hakim PTUN PKU
5. Penyusunan surat-surat yang terdapat pada Bundel B dan dalam berkas perkara tingkat banding secara umum telah terlaksana dengan baik.
6. Penyelesaian minutasi berkas-berkas perkara, baik di Bagian Kepaniteraan telah berjalan baik. Dalam melaksanakan pengawasan PTUN Pekanbaru mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 25 Juli 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya dan Peraturan Mahkamah Agung yaitu Perma Nomor 7 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim dan Perma nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan atasan langsung pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya
7. Pengawasan yang dilakukan oleh HAKIM PENGAWAN BIDANG PTUN Pekanbaru adalah pengawasan melekat dimana serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan. Pengawasan disiplin Hakim dan pegawai pada PTUN Pekanbaru sudah baik, namun perlu ditingkatkan kinerja yang lebih baik dan professional.
8. Pembukuan Keuangan Buku Kas Umum dan Buku Pembantu lainnya sudah sesuai peraturan
9. Sistem administrasi perlengkapan BMN menggunakan aplikasi SIMAK BMN sudah berjalan dengan baik
10. Tata kelola administrasi kepegawaian telah berjalan baik
11. Pengelolaan dan administrasi surat menyurat sudah rapi
12. Pengembangan Teknologi & Informasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sudah berjalan baik

Tabel 30. Tabel Pengawasan Bidang Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

No	PENGAWASAN PADA SUB BAGIAN	Subjek Pengawasan	Objek Yang Diawasi	Waktu	Tempat	Kesimpulan
1	KP DAN ORTALA	Kasubag dan staf KP	Administrasi kepegawaian dan ortala, SIKEP, komdanas dan ruangan	Maret 2021	Ruangan KP dan Ortala	Temuan telah ditindaklanjuti
		Kasubag dan staf KP	Administrasi kepegawaian dan ortala, SIKEP, Komdanas dan ruangan	Juni 2021	Ruangan KP dan Ortala	Temuan mengenai SOP
		Kasubag dan staf KP	Administrasi kepegawaian dan ortala, SIKEP, Komdanas dan ruangan	September 2021	Ruangan KP dan Ortala	Temuan telah ditindaklanjuti
		Kasubag dan staf KP	Administrasi kepegawaian dan ortala, SIKEP, Komdanas dan ruangan	Desember 2021	Ruangan KP dan Ortala	Temuan akan ditindaklanjuti
2.	UMUM dan KEUANGAN	Kasubag Umum dan keuangan serta staf	Administrasi Umum dan keuangan, Saprasi, BMN Kebersihan Kantor	Maret 2021	Ruangan Umum dan Keuangan	Temuan telah ditindaklanjuti
		Kasubag Umum dan keuangan serta staf	Administrasi Umum dan keuangan, Saprasi, BMN Kebersihan Kantor	Juni 2021	Ruangan Umum dan Keuangan	Temuan telah ditindaklanjuti
		Kasubag Umum dan keuangan serta staf	Administrasi Umum dan keuangan, Saprasi, BMN Kebersihan Kantor	September 2021	Ruangan Umum dan Keuangan	Temuan telah ditindaklanjuti
		Kasubag Umum dan keuangan serta staf	Administrasi Umum dan keuangan, Saprasi, BMN Kebersihan Kantor	Desember 2021	Ruangan Umum dan Keuangan	Tidak ada temuan
3.	PTIP	Kasubag PTIP dan staf	Administrasi PTIP, TI dan Jaringan	Maret 2021	Ruangan PTIP	Temuan telah ditindaklanjuti
		Kasubag PTIP dan staf	Administrasi PTIP, TI dan Jaringan	Juni 2021	Ruangan PTIP	Temuan telah ditindaklanjuti

		Kasubag PTIP	Administrasi PTIP, TI dan Jaringan	September 2021	Ruangan PTIP	Temuan telah ditindaklanjuti
		Kasubag PTIP dan staf	Administrasi PTIP, TI dan Jaringan	Desember 2021	Ruangan PTIP	Permasalahan Jaringan telah ditindak lanjuti. Peremajaan Website sedang dalam Proses
4.	Kepaniteraan Muda Perkara	Panmud Perkara dan staf	Admisnitiasi dan keuangan perkara	Maret 2021	Ruangan panmud perkara	Temuan telah ditindaklanjuti
		Panmud Perkara dan staf	Admisnitiasi dan keuangan perkara	Juni 2021	Ruangan panmud perkara	Temuan telah ditindaklanjuti
		Panmud Perkara dan staf	Admisnitiasi dan keuangan perkara	September 2021	Ruangan panmud perkara	-
		Panmud Perkara dan staf	Admisnitiasi dan keuangan perkara	Desember 2021	Ruangan panmud perkara	-
5.	Kepaniteraan Muda Hukum	Panmud Hukum dan staf	Administrasi Pankum, Statistik dan perkara ingkrah	Maret 2021	Ruangan Panmud hukum	Temuan telah ditindaklanjuti
		Panmud Hukum dan staf	Administrasi Pankum, Statistik dan perkara ingkrah	Juni 2021	Ruangan Panmud hukum	Temuan telah ditindaklanjuti
		Panmud Hukum dan staf	Administrasi Pankum, Statistik dan perkara ingkrah	September 2021	Ruangan Panmud hukum	Temuan telah ditindaklanjuti
		Panmud Hukum dan staf	Administrasi Pankum, Statistik dan perkara ingkrah	Desember 2021	Ruangan Panmud hukum	Temuan akan ditindaklanjuti
6.	PNBP	Kasir dan Bendahara Penerima		Maret 2021	Ruangan Keuangan dan Ruang kasir	Temuan telah ditindaklanjuti
		Kasir dan Bendahara Penerima	Adminstrasi PNBP	Juni 2021	Ruangan Keuangan dan Ruang kasir	Temuan telah ditindaklanjuti
		Kasir dan Bendahara Penerima	Adminstrasi PNBP	September 2021	Ruangan Keuangan dan Ruang kasir	Temuan telah ditindaklanjuti
		Kasir dan Bendahara Penerima	Adminstrasi PNBP	Desember 2021	Ruangan Keuangan dan Ruang kasir	Temuan telah ditindaklanjuti

B. EVALUASI

Pada tahun 2021 dilakukan evaluasi atas Hasil Pengawasan terhadap bagian-bagian di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yaitu

1. Melaksanakan briefing setiap bulan untuk mengevaluasi pelaksanaan kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yaitu
2. Membuat kontrak kinerja. Monitoring dan Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa PTUN Pekanbaru sudah menindaklanjuti hasil temuan pengawasan /kontrak kinerja pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, evaluasi pelayanan peradilan juga dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Survei Kepuasan Masyarakat secara elektronik untuk melihat respon terhadap pelayanan publik. Hasil survei kepuasan pelanggan sejumlah 139 responden terhadap 11 (sebelas) ruang lingkup layanan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar **93.84** dengan mutu pelayanan **SANGAT BAIK**.
- b. Indeks Presepsi Korupsi secara elektronik untuk melihat hasil survei masyarakat terhadap Presepsi Korupsi di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tahun 2021, hasil Indeks Presepsi Korupsi terhadap 139 responden sebesar **3.74** dengan mutu persepsi **BERSIH DARI KORUPSI**.

Tabel 42. IKM & IPK Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru



BAB VII

PENUTUP



A. KESIMPULAN

Selama tahun 2021 ditengah masa pandemic covid-19, Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tetap berupaya melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan memberikan pelayanan publik dengan baik dan mematuhi protocol Kesehatan covid-19 . Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum, dan dalam hal pembinaan dan pengawasan.

1. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara dan administrasi umum sudah berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya;
2. Tingkat penyelesaian perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya;
3. Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sudah menerapkan Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yaitu pelayanan pengadilan secara terintegrasi dalam

satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu.

4. Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sudah menerapkan aplikasi *E-Court* dengan fitur *e-filing* (pendaftaran perkara secara elektronik), *e-payment* (pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik), sehingga pendaftar gugatan/permohonan dari seorang advokat ataupun pengguna terdaftar dapat melakukan pendaftaran di mana saja, kapan saja tanpa harus datang ke pengadilan.

Dibalik beberapa aspek yang telah dicapai tersebut, pada tahun 2021 Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru masih mengalami kendala antara lain :

- a. Sumber daya manusia, khususnya staf yang ahli dibidang teknologi informasi masih kurang
- b. Sarana dan prasarana gedung dan fasilitas perkantoran masih kurang

- c. Gedung kantor yang tidak layak, tidak sesuai dengan prototype Pengadilan Kelas 1A.
- d. Fasilitas rumah dinas Hakim kurang, dan banyak rumah dinas yang tidak terpelihara karena tidak tersedia anggaran rehab rumah dinas.

B. REKOMENDASI

Untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas dan menunjang peningkatan kinerja di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru maka diperlukan :

- a. Penambahan sumber daya manusia yang ahli dan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan
- b. Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana, pembangunan gedung kantor dan rumah dinas.